



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2020**

JL. A. YANI No. 16
BANJARNEGARA
TELEPON (0286) 591043

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP memberikan dua pilihan basis akuntansi, yakni (1) Basis Akrua, atau (2) Basis Kas Menuju Akrua. Basis Kas Menuju Akrua boleh diterapkan paling lambat sampai dengan tahun anggaran 2015 sedangkan Basis Akrua wajib diterapkan mulai tahun anggaran 2016. Pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara baru mulai menerapkan SAP Berbasis Akrua.

Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2020. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Banjarnegara, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banjarnegara

R. RIONO RAHADI PRASETYO, SH, M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19640217 198607 1 001

DAFTAR ISI

URAIAN	HAL
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3-4
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	5
LAPORAN KEUANGAN.....	6
A LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	6
B LAPORAN OPERASIONAL	6
C LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
D NERACA.....	10
E CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	11
I PENDAHULUAN	12
II KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
III PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN	26

LAMPIRAN :

I LAPORAN-LAPORAN PENDUKUNG

1. Laporan Realisasi Anggaran :

- Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (SIMDA)
- Buku Panjar
- SPJ Pengeluaran (Bulan Desember 2020 ; Jenis Laporan Fungsional-SIMDA)
- SPJ Pendapatan (Bulan Desember; jenis laporan fungsional – SIMDA)
- Fotocopy STS pengembalian belanja (UP,TU,LS)
- Fotocopy Surat Setor Pajak (SSP) atas pajak yang disetorkan ke Kas Negara Tahun 2020
- Daftar Pendapatan yang tidak mencapai target/melebihi target beserta penjelasannya
- Daftar Kegiatan yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang anggarannya tidak terserap secara signifikan beserta penjelasannya.

2. Laporan Operasional



3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Neraca

- Neraca Manual dan Neraca SIMDA
- Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Salinan Rekening Koran Bank Per 31 Desember 2020
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan Per 31 Desember 2020
- Format manual beserta penjelasannya (Form 1 s/d 13)
- Berita Acara Serah Terima Aset Tetap (Mutasi)
- Berita Acara Penilaian Aset Tetap
- Berita Acara/Keputusan Penghapusan Aset
- Dokumen lain terkait Neraca SKPD

II PERNYATAAN TELAH REKONSILIASI SALDO ASET TETAP MENURUT AKUNTANSI DENGAN PENGURUS BARANG

III PERNYATAAN KESESUAIAN ANTARA CATATAN DAN FISIK ASET TETAP (KUANTITAS DAN SPESIFIKASI)

IV LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

- Kartu Inventaris Barang A Tanah
- Kartu Inventaris Barang B Peralatan dan Mesin
- Kartu Inventaris Barang C Gedung dan Bangunan
- Kartu Inventaris Barang D Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Kartu Inventaris Barang E Aset tetap Lainnya
- Kartu Inventaris Barang F Konstruksi Dalam Pengerjaan

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Banjarnegara, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banjarnegara

R. RIONO RAHADI PRASETYO, SH, M.H

Pembina Tk. I
NIP. 19640217 198607 1 001

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2020		TA 2019	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5
Pendapatan	280.410.205	531.753.682	550.739.610	554.944.337
Pendapatan Asli Daerah	280.410.205	531.753.682	550.739.610	554.944.337
- Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
- Hasil Retribusi Daerah	227.910.205	468.522.412	450.739.610	445.658.809
- Hasil Pengel Kky Daerah Dipisahkan	-	-	-	-
- Lain-lain PAD Yang Sah	52.500.000	63.231.270	100.00.000	109.285.528
Belanja	6.349.446.609	6.002.259.943	7.418.889.686	6.745.140.892
Belanja Operasi	6.089.917.759	5.753.031.943	7.051.804.686	6.389.708.292
Belanja Modal	259.528.850	249.228.000	367.085.000	355.432.600
Surplus/Defisit	(6.069.036.404)	(5.470.506.261)	(6.868.150.076)	(6.190.196.555)

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Ringkasan Laporan Operasional disajikan sebagai berikut :

URAIAN	SALDO 2020
1	2
PENDAPATAN – LO	531.874.653,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	531.874.653,00
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	468.643.383,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	63.231.270,00
PENDAPATAN TRANSFER – LO	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	0,00
Bantuan Keuangan – LO	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	0,00
Pendapatan Hibah – LO	0,00
Dana Darurat – LO	0,00
Pendapatan Lainnya – LO	0,00
SURPLUS NON OPERASIONAL – LO	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00
PENDAPATAN LUAR BIASA – LO	0,00
Pendapatan Luar Biasa – LO	0,00
BEBAN	6.447.892.244,00
BEBAN OPERASI	6.447.892.244,00
Beban Pegawai – LO	2.896.576.325,00
Beban Persediaan	506.766.158,00
Beban Jasa	2.194.781.492,00
Beban Pemeliharaan	40.220.250,00
Beban Perjalanan Dinas	162.297.896,00
Beban Bunga	0,00
Beban Subsidi	0,00
Beban Hibah	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	646.584.780,00
Beban Penyisihan Piutang	665.343,00

Beban Lain-lain	0,00
BEBAN TRANSFER	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00
BEBAN LUAR BIASA	0,00
Beban Luar Biasa	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.916.017.591,00)

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- Koreksi kesalahan mengenai perhitungan aset lancar dan non lancar.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas, disajikan sebagai berikut :

EKUITAS AWAL	1.751.547.006,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.916.017.591,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	

Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi Nilai Kas	0,00
Koreksi Nilai Piutang	0,00
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	0,00
Koreksi Nilai Beban dibayar di Muka	0,00
Koreksi Nilai Investasi Jangka panjang Non Permanen	0,00
Koreksi Nilai Penyisihan Investasi jangka Panjang Non Permanen	0,00
Koreksi Nilai Investasi Jangka panjang Permanen	0,00
Koreksi Nilai Tanah	0,00
Koreksi Nilai Peralatan Mesin	9.220.000
Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan	0,00
Koreksi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap lainnya	0,00
Koreksi Nilai Kontruksi Dalam Pekerjaan	0,00
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00
Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00
Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud	0,00
Koreksi Nilai Aset Rusak	1.880.000,00
Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00
Koreksi Nilai Utang PFK	0,00
Koreksi Nilai Pendapatan diterima di Muka	0,00
Koreksi Nilai Utang Beban	(556.085)
Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
Koreksi Nilai Pendapatan	0,00
Koreksi Nilai Beban	0,00
Koreksi Ekuitas lainnya	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.470.506.261,00
EKUITAS AKHIR	1.316.579.591,00

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 (*restatement*) dapat disajikan sebagai berikut:

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas di Bendahara JKN	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	5.201.772,00	5.080.801,00
Penyisihan Piutang	(665.343),00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	1.094.500,00	1.840.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	5.630.929,00	6.920.801,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	6.897.799.954,00	7.852.348.325,00
Gedung dan Bangunan	398.695.000,00	398.695.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	400.574.729,00	400.574.729,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.417.946.054,00)	(7.042.570.245,00)
JUMLAH ASET TETAP	1.279.123.629,00	1.609.047.809,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	96.855.200,00	140.927.800,00
Aset Lain-lain	1.880.000,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	98.735.200,00	140.927.800,00
JUMLAH ASET	1.383.489.758,00	1.756.896.410,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	66.910.167,00	5.349.404,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	66.910.167,00	5.349.404,00
EKUITAS		
EKUITAS	1.316.579.591,00	1.751.547.006,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.383.489.758,00	1.756.896.410,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah (KUD). Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas pendapatan dan aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari RKUD.

I. PENDAHULUAN

Dasar

A. DASAR HUKUM

Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 24 Seri E)
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 65);

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI

<i>Entitas akuntansi</i>	Entitas akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara mengelola pendapatan yang bersumber dari Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fasilitas Umum.
<i>Basis</i>	Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu

Akuntansi

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) / Bendahara Penerimaan atau dikeluarkan dari Bendahara Umum Daerah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Penyajian Pendapatan dan Beban dalam Laporan Operasional, diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan pendapatan dan timbulnya kewajiban dan beban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Bendahara Penerimaan/ Bendahara Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Aset

1. Aset

Adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk

dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara/daerah. PMD pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Aset tetap

c. Aset tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2020 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1

Januari 2008 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan
- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pada Tahun Anggaran 2020, terhadap seluruh aset tetap Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilakukan penyusutan dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, kecuali :

1. Tanah;
2. Barang Bercorak Seni Budaya
3. Hewan Ternak dan Tanaman
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan
5. Buku dan Perpustakaan

Sehubungan dengan mulai diterapkannya basis akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD yang akan dikonsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintah daerah, Pada Tahun 2020 dilakukan perhitungan kembali akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020, sesuai dengan peraturan yang diterapkan mengenai penyusutan aset tetap. Perhitungan kembali atas akumulasi aset tetap dimaksud dituangkan dalam neraca *restatement*.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas untuk

penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

Pada Tahun 2020 juga dilakukan perhitungan akumulasi penyusutan/amortisasi aset lain-lain yang berupa aset tidak berwujud dan aset rusak, dan hasil perhitungan dituangkan dalam neraca *restatement*.

Kewajiban

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Pendapatan diterima di Muka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan

lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Pendapatan **4. Pendapatan – LRA**

– LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun

pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

***Belanja –
LRA***

5. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Transfer

6. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi

Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh

pemerintah daerah

Pembiayaan

7. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**Pendapatan-
LO**

8. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan (kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian) dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)

Beban

9. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat

berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).

Beban diakui pada:

- Saat timbulnya kewajiban;
- Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

III. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. 1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.531.753.682,00 atau 189,63 % dari total anggaran, Realisasi Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.002.259.943,00 atau 94,53 % dari total anggaran. Realisasi pendapatan dan belanja pada Tahun 2020, sebagai berikut :

(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
I	PENDAPATAN	280.410.205	531.753.682	189,63	554.944.337
1.1	Pendapatan Asli Daerah	280.410.205	531.753.682	189,63	554.944.337
II	BELANJA	6.349.446.609	6.002.259.943	94,53	6.745.140.892
2.1	Belanja Operasi	6.089.917.759	5.753.031.943	94,47	6.389.708.292
2.2	Belanja Modal	259.528.850	249.228.000	96,03	355.432.600
III	SURPLUS/DEFISIT	(6.069.036.404)	(5.470.506.261)	90,14	(6.190.196.555)

A. 2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp.531.753.682,00 atau 189,63 % dari anggaran sebesar Rp. 280.410.205, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	280.410.205	531.753.682	189,63	554.944.337
	JUMLAH	280.410.205	531.753.682	189,63	554.944.337

Realisasi
Pendapatan Asli
Daerah
Rp
531.753.682,00

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah Kabupaten Banjarnegara. Realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 531.753.682,00 atau 189,63 % dari anggaran sebesar Rp. 280.410.205,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Hasil Pajak Daerah	0	0	0	0
2	Hasil Retribusi Daerah	227.910.205	468.522.412	205,57	445.658.809
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	52.500.000	63.231.270	120,44	109.285.528
	JUMLAH	280.410.205	531.753.682	189,63	554.944.337

Realisasi
Penerima

1.1. Hasil Retribusi Daerah

an Hasil
Retribusi
Daerah
Rp
468.522.4
12,00

Realisasi penerimaan hasil retribusi daerah tahun 2020 sebesar Rp. 468.522.412,00 atau 205,57 % dari anggaran yang direncanakan dalam DPA sebesar Rp. 227.910.205,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020			Th 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-
2	Pengendalian Menara Telekomunikasi	227.910.205	468.522.412	205,57	445.658.809
3	Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil	-	-	-	-
4	Parkir di tepi Jalan	-	-	-	-
5	Pelayanan Pasar	-	-	-	-
6	Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
7	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	-
8	Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-
9	Retribusi Terminal	-	-	-	-
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	-	-	-	-
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-
13	Retribusi IMB	-	-	-	-
14	Retribusi Ijin	-	-	-	-

	Gangguan/Keramaian				
15	Retribusi Ijin Trayek	-	-	-	-
	JUMLAH	227.910.205	468.522.412	205,57	445.658.809

Realisasi

1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Lain-Lain

Pendapata

n Asli

Daerah

Rp

63.231.27

0,00

Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2020 sebesar Rp. 63.231.270,00 atau 120,44 % dari anggaran yang direncanakan dalam DPA sebesar Rp. 52.500.000,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-
2	Pendapatan Jasa Giro	-	-	-	-
3	Penerimaan Bunga Deposito	-	-	-	-
4	Tuntutan ganti Rugi	-	-	-	-
5	Pendapatan Denda Retribusi.....	-	-	-	-
6	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-
7	Fasos dan Fasum	52.500.000	63.231.270	120,44	109.285.528
8	Pendapatan Jasa Pinjaman UMKM	-	-	-	-
9	Bagi Hasil Penj Ternak	-	-	-	-
10	Likuidasi Bank Pasar	-	-	-	-
11	Penerimaan Kelompok Masyarakat/Perorangan	-	-	-	-
11	Pendapatan Pihak Ketiga-PLTMH	-	-	-	-

	JUMLAH	52.500.000	63.231.270	120,44	109.285.528
--	---------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------------

Belanja

Rp.

6.002.259.

943,00

B. BELANJA

Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp.6.002.259.943,00 atau 94,53 % dari anggaran sebesar Rp. 6.349.446.609,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Operasi	6.089.917.759	5.753.031.943	94,47	6.389.708.292
2	Belanja Modal	259.528.850	249.228.000	96,03	355.432.600
	JUMLAH	6.349.446.609	6.002.259.943	94,53	6.745.140.892

Belanja

Operasi

Rp.

5.753.031.

943,00

1. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 5.753.031.943,00 atau 94,47% dari anggaran sebesar Rp. 6.089.917.759,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Pegawai	2.956.913.261	2.893.024.410	97,84	3.210.024.126
2	Belanja Barang dan Jasa	3.133.044.498	2.860.007.533	91,29	3.179.684.166
	JUMLAH	6.089.917.759	5.753.031.943	94,53	6.389.708.292

Belanja

Pegawai

Rp.

2.893.024.

410,00

1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 2.893.024.410,00 atau 97,84 % dari anggaran sebesar Rp. 2.956.613.261,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.943.523.000	1.927.240.038	99,17	2.009.055.407
2	Tambahan Penghasilan PNS	728.868.000	727.681.647	99,84	841.000.000
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-
4	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25.000.000	16.902.735	67,62	21.461.719
5	Belanja Pegawai (Belanja Langsung)	259.522.261	221.199.990	85,24	338.507.000
	JUMLAH	2.956.913.261	2.893.024.410	97,84	3.210.024.126

Belanja
Barang
Rp.
3.081.207.
523,00

1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 2.860.007.533,00 atau 91,29% dari anggaran sebesar Rp. 3.133.004.498,00, dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	55.793.133	54.889.658	98,39	85.383.700
2	Belanja Bahan/Material	41.510.800	40.285.800	97,05	193.635.850
3	Belanja Jasa Kantor	2.333.635.283	2.119.908.729	90,85	2.145.356.930
4	Premi Asuransi	-	-		-
5	Belanja Perawatan	40.538.000	40.220.250	99,22	39.297.625



	Kendaraan Bermotor				
6	Belaja Cetak dan Penggandaan	341.630.300	335.465.200	98,20	193.901.900
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	0	0	0	2.921.504
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	6.000.000
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.250.000	4.250.000	100	15.125.000
10	Belanja Makanan dan Minuman	90.087.500	75.380.000	83,68	108.687.500
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	-
12	Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	-	-	-
14	Belanja Perjalanan Dinas	171.109.482	162.297.896	94,86	345.064.157
15	Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
16	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	-	-	-	-
17	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
18	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	-
20	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber	12.950.000	12.350.000	95,37	22.750.000
21	Belanja Honorarium PNS	-	-	-	-

22	Belanja Honorarium Non PNS	-	-	-	-
23	Belanja Perangkat Lunak	41.500.000	14.960.000	36,05	21.560.000
	JUMLAH	3.392.526.759	3.081.207.523	90,82	3.179.684.166

Belanja Modal Rp. 249.228.000,00

1. Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2020 sebesar Rp.249.228.000,00 atau 96,03% dari anggaran sebesar Rp.259.528.850,00, dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

No.	Belanja Modal	Tahun 2020			Th 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	259.528.850	249.228.000	96,03	355.432.600
3	Bangunan dan Gedung	-	-	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Aset tetap Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	259.528.850	249.228.000	96,03	355.432.600

Surplus/ (Defisit) Rp 5.470.506.261,00)

2. Surplus/(Defisit)

Surplus (Defisit) adalah merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah APBD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara TA 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Banjarnegara sebesar (Rp. 5.470.506.261,00) atau mencapai 90,14 persen dari yang dianggarkan surplus/(deficit) sebesar (Rp. 6.069.036.404,00).

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp.531.874.653,00 dan Beban yang disajikan sebesar Rp. 6.447.892.244,00 sehingga terdapat surplus/defisit sebesar (Rp. 5.916.017.591,00) Realisasi pendapatan, dan beban secara rinci Tahun 2020, sebagai berikut :

(dalam satuan rupiah)

<i>No.</i>	<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2020</i>
I	PENDAPATAN – LO	531.874.653
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	468.643.383
1.2	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	63.231.270
II	BEBAN	6.447.892.244
2.1	Beban Operasi	6.447.892.244
2.2	Beban Transfer	0
2.3	Defisit Non Operasional	0
2.4	Beban Luar Biasa	0
III	SURPLUS/DEFISIT – LO	(5.916.017.591)

B. 2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

B.2.1 PENDAPATAN – LO

B.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan asli daerah LO merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah Kabupaten Banjarnegara. Realisasi pendapatan asli daerah LO Tahun 2020, merupakan pendapatan asli daerah yang sudah menjadi hak pemerintah daerah walaupun belum seluruhnya diterima di RKUD / Bendahara Penerimaan.

Pendapatan Asli Daerah – LO terealisasi Rp. 531.874.653,00 dengan perincian, sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

<i>No.</i>	<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2020</i>
1	Pendapatan Pajak Daerah- LO	0

2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	468.643.383
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah- LO	63.231.270
	JUMLAH	531.874.653

B.2.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah- LO

Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah- LO tahun 2020 sebesar Rp. 468.643.383,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

<i>No.</i>	<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2020</i>
1	Pengendalian Menara Telekomunikasi	468.643.383
2	Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil – LO	-
3	Parkir di tepi Jalan – LO	-
4	Pelayanan Pasar – LO	-
5	Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	-
6	Pemeriksaan Alat Pemadam - LO Kebakaran	-
7	Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	-
8	Retribusi Terminal – LO	-
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	-
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LO	-
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	-
12	Retribusi IMB – LO	-
13	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian – LO	-
14	Retribusi Ijin Trayek – LO	-
	JUMLAH	468.643.383

B.2.1.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LO tahun 2020 sebesar Rp.63.231.270,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2020</i>
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO	-
2	Pendapatan Jasa Giro-LO	-
3	Penerimaan Bunga Deposito-LO	-
4	Tuntutan ganti Rugi –LO	-
5	Pendapatan Denda Retribusi –LO	-
6	Pendapatan dari Pengembalian –LO	-
7	Fasos dan Fasum-LO	63.231.270
8	Pendapatan Jasa Pinjaman UMKM-LO	-
9	Bagi Hasil Penj Ternak-LO	-
10	Likuidasi Bank Pasar-LO	-
11	Penerimaan Kelompok Masyarakat/Perorangan-LO	-
12	Pendapatan Pihak Ketiga-PLTMH-LO	-
13	Pendapatan dari Denda Pelanggaran Perda-LO	-
	JUMLAH	63.231.270

B.2.2. BEBAN

Realisasi Beban tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 6.447.692.046,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2020</i>
1	Beban Operasi	6.447.892.244
2	Beban Transfer	-
3	Beban Non Operasional	-
4	Belanja Luar Biasa	-
	JUMLAH	6.447.892.244

B.2.2.1. Beban Operasi

Realisasi Beban Operasi Tahun 2020 sebesar Rp. 6.447.892.244,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2020</i>
1	Beban Pegawai	2.896.576.325
2	Beban Persediaan	506.766.158
3	Beban Jasa	2.194.781.492
4	Beban Pemeliharaan	40.220.250
5	Beban Perjalanan Dinas	162.297.896
6	Beban Bunga	-
7	Beban Subsidi	-
8	Beban Hibah	-
9	Beban Bantuan Sosial	-
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	646.584.780
11	Beban Penyisihan Piutang	665.343
12	Beban Lain-lain	-
	JUMLAH	6.447.892.244

B.2.2.1.1. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp. 2.896.576.325,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2020</i>
1	Beban Gaji dan Tunjangan	1.926.683.953
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	731.789.647
3	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja	-
4	Beban Jaminan Kematian	-
5	Beban Honorarium PNS	185.840.000
6	Beban Honorarium Non PNS	35.359.990
7	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-
8	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-
9	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.902.735
	JUMLAH	2.896.576.325

B.2.2.1.2 .Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2020 sebesar Rp 2.904.065.796,00, dengan perincian, sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2020
1	Beban Bahan Pakai Habis	55.635.158
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	40.285.800
3	Beban Jasa Kantor	2.177.361.492
4	Beban Premi Asuransi	-
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	40.220.250
6	Beban Cetak dan Penggandaan	335.465.200
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	-
9	Beban Sewa Alat Berat	-
10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.250.000
11	Beban Makanan dan Minuman	75.380.000
12	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	-
13	Beban Pakaian Kerja	-
14	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-
15	Beban Perjalanan Dinas	162.297.896
16	Beban Perjalanan Pindah Tugas	-
17	Beban Pemulangan Pegawai	-
18	Beban Pemeliharaan	-
19	Beban Jasa Konsultasi	-
20	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-
21	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-
22	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-
23	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-
24	Beban Narasumber/Tenaga Ahli	12.350.000
25	Beban Honorarium PNS – LO	-
26	Beban Honorarium Non PNS – LO	-
27	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-
28	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	-
29	Beban Barang Dana BOS	-
15	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan	-

	Kesehatan Nasional	
16	Belanja Bahan dan Peralatan Kedokteran	-
17	Beban Barang Jasa Jaminan Kesehatan Nasional	-
18	Belanja Inventaris Non Kapitalisasi	820.000
19	Beban Belanja Perangkat Lunak	0
	JUMLAH	2.904.065.796

B.2.2.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 646.584.780,00, dengan perincian, sebagai berikut:

B.2.2.1.3.1. Beban Penyusutan Mesin dan Peralatan

No	Uraian	Saldo 2020
1	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	-
2	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	-
3	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	20.721.429
4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	42.568.513
5	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-
6	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	2.370.000
7	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	307.000
8	Beban Penyusutan Alat Ukur	520.000
9	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	-
10	Beban Penyusutan Alat Kantor	12.633.000
11	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	36.703.129
12	Beban Penyusutan Komputer	312.052.773
13	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.220.000
14	Beban Penyusutan Alat Studio	57.702.300
15	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	32.832.000
16	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	38.919.400
	JUMLAH	559.549.544

B.2.2.1.3.2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2020</i>
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.973.900
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	-
4	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	
5	Beban Penyusutan Bangunan Candi	
6	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
7	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	
	JUMLAH	7.973.900

B.2.2.1.3.3. Beban Penyusutan Jalan , Irigasi dan Jaringan

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2020</i>
1	Beban Penyusutan Instalasi Gas	-
2	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	8.820.773
3	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	-
4	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	-
5	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	11.207.963
6	Beban Penyusutan Jaringan Gas	-
	JUMLAH	20.028.736

B.2.2.1.3. 4. Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2020</i>
1	Beban Amortisasi Goodwill	-
2	Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise	-
3	Beban Amortisasi Hak Cipta	-
4	Beban Amortisasi Paten	-
5	Beban Amortisasi Software	59.032.600
	JUMLAH	59.032.600

C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

EKUITAS AWAL	1.751.547.006,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.916.017.591,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	

Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi Nilai Piutang	0,00
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	0,00
Koreksi Nilai Peralatan Mesin	9.220.000,00
Koreksi Nilai Jalan, Irigasi, Jaringan	0,00
Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud	0,00
Koreksi Nilai Aset Rusak	1.880.000
Koreksi Nilai Utang Beban	(556.085,00)
Koreksi ekuitas lainnya	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.470.506.261,00
EKUITAS AKHIR	1.316.579.591,00

Sesuai dengan Neraca Per 31 Desember 2020 (restatement), Ekuitas Awal SKPD Tahun 2020 sebesar Rp. 1.751.547.006,00 Defisit adalah (Rp. 5.916.017.591,00) sedangkan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar Rp 10.543.915,00, Kewajiban untuk di konsolidasikan sebesar Rp 5.470.506.261,00 sehingga Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2020 adalah Rp. 1.316.579.591,00.

D. NERACA

1. PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca (Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara) per 31 Desember 2020 dengan komposisi sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Th 2020	Th 2019	
		Jumlah	Jumlah	
1	Aset	1.383.489.758	1.756.896.410	
2	Akumulasi Penyusutan	(6.417.946.054)	(7.042.570.245)	(
3	Kewajiban	66.910.167	5.349.404	
4	Ekuitas	1.316.579.591	1.751.547.006	

2. PENJELASAN PER POS NERACA

2.1. Aset Lancar

<i>Piutang</i> <i>Retribusi Rp</i> <i>5.201.772,00</i>	2.1.1 Piutang Retribusi sebesar Rp 5.201.772,00	<p>Piutang retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5.201.772,00 dari pendapatan pengendalian menara telekomunikasi. Adapun piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.080.801,00 dengan kata lain sampai dengan 31 Desember 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika masih memiliki piutang yang berasal dari pendapatan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>Piutang pengendalian menara telekomunikasi yang masih tercatat sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.201.772,00 yang merupakan piutang dari beberapa pemilik menara. Bahwa berdasarkan surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tanggal 15 juli 2019 menara telekomunikasi dengan nomor M0093 yang beralamat di Desa Kebutuh Jurang Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Pagedongan adalah masuk kedalam tagihan milik PT. Telekomsel dan bersamaan dengan proses tagihan tersebut ternyata menara telekomunikasi tersebut masih dalam proses perpindahan kepemilikan dengan PT. Telkomsel yang mengakibatkan terhambatnya proses pembayaran retribusi menara telekomunikasi Tahun 2020 tetapi PT. Telkomsel bersedia membayar tunggakan retribusi tersebut setelah proses perpindahan kepemilikan secara administrasi sudah selesai.</p> <p>Sedangkan untuk menara telekomunikasi dengan nomor M0185 yang beralamat di Desa Sigeblog Rt. 004 Rw. 005 Kecamatan Banjarmangu adalah menara telekomunikasi milik PT. Telkomsel. Pihak PT. Telkomsel mengakui telah terjadi kekurangan pembayaran tagihan retribusi menara telekomunikasi tahun 2020 dan akan di bayarkan tahun 2021.</p> <p>Rincian piutang atas pengendalian menara telekomunikasi selengkapnya adalah sebagai berikut:</p>
--	--	---

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31/12/2020	31/12/2019
1.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	5.201.772,00	5.080.801,00
	Jumlah	5.201.772,00	5.080.801,00

Persediaan 2.1.2 Persediaan sebesar Rp 1.094.500,00

Rp

1.094.500,00

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Banjarnegara, Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.094.500,00, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian Persediaan	31/12/2020	31/12/2019
1	Persediaan Bahan Pakai Habis	1.094.500,00	1.840.000,00
	Jumlah	1.094.500,00	1.840.000,00

Berikut ini merupakan rincian persediaan bahan pakai habis:

No.	Uraian Persediaan	31/12/2020
1	ATK	1.094.500,00
	Jumlah	1.094.500,00

Rincian lebih lanjut lihat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan Bahan Pakai Habis (ATK) pada lampiran Nomor : 045/ 168.1 /2020.

Aset tetap Rp 2.2. Aset tetap sebesar Rp. 7.697.069.683,00

7.697.069.68

3,00

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 7.697.069.683,00. Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode

akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang dan jasa (BOP), Mutasi Masuk dari SKPD, Hibah Masuk dari Non SKPD, Reclass Masuk, dan Koreksi Tambah. Sedangkan pengurangan Aset tetap bersumber dari Mutasi Keluar ke SKPD, Hibah keluar ke non SKPD, Reclass Keluar, Koreksi Kurang, Penghapusan, dan Nilai aset di bawah minimal kapitalisasi.

Aset tetap di Neraca disajikan secara historis yaitu sebesar harga perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Saldo per 31/12/2019	Mutasi		Saldo per 31/12/2020
		Tambah	Kurang	
Tanah	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin	7.852.348.325	575.972.500	1.530.520.871	6.897.799.954
Gedung dan Bangunan	398.695.000	0	0	398.695.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	400.574.729	0	0	400.574.729
Aset tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	8.651.618.054	575.972.500	1.530.520.871	7.697.069.683

Perubahan aset tetap selama tahun 2020 sebesar Rp. 954.548.371,00 yaitu saldo aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 7.697.069.683,00 dikurangi saldo aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.651.618.054,00 atau mutasi penambahan aset tetap tahun 2020 sebesar

Rp. 575.972.500,00 dikurangi dengan mutasi pengurangan aset tetap tahun 2020 sebesar Rp. 1.530.520.871,00

Rincian Aset tetap berdasarkan Kartu Inventaris Barang dilaporkan dalam **Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Banjarnegara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini.

*Peralatan
dan Mesin
Rp
6.897.799.95
4,00*

2.2.1 Peralatan dan Mesin sebesar

Rp. 6.897.799.954,00

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 sebanyak 562 unit dengan nilai sebesar Rp. 6.897.799.954,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebanyak 637 unit dengan nilai sebesar Rp. 7.852.348.325,00, sehingga terdapat penurunan sebanyak 75 unit dengan nilai sebesar Rp. 954.548.371,00.

Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp 6.897.799.954,00 tersebut merupakan nilai historis/perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Saldo peralatan dan mesin yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020 sebanyak 562 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp. 6.897.799.954,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2019	Mutasi Tahun 2020		Saldo 31/12/2020
		Tambah	Kurang	
Alat Besar	145.050.000	-	-	145.050.000
Angkutan	705.449.822	137.000.000	86.500.000	755.949.822
Bengkel dan alat ukur	27.835.000	0	0	27.835.000
Alat Kantor dan Rumah Tangga	749.297.197	134.269.500	129.134.000	754.432.697
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.453.030.300	201.979.000	662.415.000	1.992.594.300
Komputer	3.771.686.006	102.724.000	652.471.871	3.221.938.135

Mutasi penambahan tahun 2020 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Belanja Modal :	28	249.228.000
- Alat Kantor	1	5.900.000
- Alat Rumah Tangga	5	49.632.500
- Peralatan Komputer	7	61.439.000
- Alat Studio	15	107.796.500
- Alat Komunikasi	8	24.460.000
• Belanja Non Belanja Modal	-	-
• Mutasi masuk dari BPPKAD	7	148.100.000
• Hibah masuk dari non SKPD	-	-
• Reklas masuk	24	178.644.500
• Koreksi tambah	-	-
Jumlah	59	575.972.500

Mutasi pengurangan tahun 2020 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke BPPKAD	3	86.500.000
• Hibah keluar ke non SKPD	-	-
• Koreksi kurang	-	-
• Penghapusan Alat Komunikasi	-	-
• Reklas Keluar	113	1.443.200.871
• Nilai di bawah min kapitalisasi	-	820.000
Jumlah	116	1.530.520.871

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 sebanyak 562 unit dengan nilai Rp. 6.897.799.954,00 tersebut meliputi :

No	Uraian	Jumlah (unit)	Nilai (Rp)
1.	Alat besar	1	145.050.000
2.	Alat angkutan	16	755.949.822
3.	Alat bengkel dan alat ukur	3	27.835.000
4.	Alat komputer	152	3.221.938.135
5.	Alat pertanian	-	-
6.	alat kantor dan rumah tangga	231	754.432.697

7.	alat studio, komunikasi, dan pemancar	159	1.992.594.300
	Jumlah	562	6.897.799.954

Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Per 31 Des 2020	6.897.799.954
1. Penyusutan Tahun 2020	(559.549.544)
2. Akumulasi Penyusutan s/d tahun lalu	(5.557.335.036)
3. Akumulasi Penyusutan s/d tahun ini	(6.116.884.580)
5. Nilai Buku Per 31 Desember 2020	780.915.374

Gedung dan Bangunan Rp 398.695.000,00

2.2.2 Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 398.695.000,00

Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari Ruang Bidding, Ruang NOC dan Kerangka Baliho yang tersebar di beberapa titik.

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 sebanyak 11 unit dengan nilai sebesar Rp. 398.695.000,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebanyak 11 unit dengan nilai sebesar Rp. 398.695.000,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,00. Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp 398.695.000,00 tersebut merupakan nilai historis/perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Saldo gedung dan bangunan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020 sebanyak 11 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp. 398.695.000,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2019	Mutasi Tahun 2020		Saldo 31/12/2020
		Tambah	Kurang	
Bangunan	398.695.000	-	-	398.695.000
Gedung				
Bangunan	-	-	-	-

Monumen				
---------	--	--	--	--

Mutasi penambahan tahun 2020 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Belanja Modal	-	-
• Belanja Non Belanja Modal	-	-
• Mutasi masuk dari SKPD	-	-
• Hibah masuk dari non SKPD	-	-
• Koreksi tambah	-	-
Jumlah	-	-

Mutasi pengurangan tahun 2020 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke SKPD	-	-
• Hibah keluar ke non SKPD	-	-
• Reclass keluar	-	-
• Koreksi kurang	-	-
• Penghapusan	-	-
Jumlah	-	-

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebanyak 11 unit dengan nilai Rp. 398.695.000,00 tersebut meliputi :

No	Uraian	Jumlah (unit)	Nilai (Rp)
1.	Bangunan Gedung	11	398.695.000
2.	Bangunan Monumen	-	-
	Jumlah	11	398.695.000

Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2020 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Per 31 Des 2020	398.695.000
------------------------------------	-------------

2. Penyusutan Tahun 2020	(7.973.900)
3. Akumulasi Penyusutan s/d tahun lalu	(52.354.000)
4. Akumulasi Penyusutan s/d tahun ini	(60.327.900)
5. Nilai Buku Per 31 Desember 2020	338.367.100

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp
400.574.729*

2.2.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 400.574.729,00

Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2020 sebanyak 3 dengan nilai sebesar Rp 400.574.729,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebanyak 3 dengan nilai sebesar Rp Rp 400.574.729,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 400.574.729,00 tersebut merupakan nilai historis/perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020, dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2019	Mutasi Tahun 2019		Saldo 31/12/2020
		Tambah	Kurang	
Jalan dan jembatan	-	-	-	-
Bangunan air/irigasi	-	-	-	-
Instalasi	176.415.479	-	-	176.415.479
Jaringan	224.159.250	-	-	224.159.250
Jumlah	400.574.729	-	-	400.574.729

Mutasi penambahan tahun 2020 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Belanja Modal	-	-
• Belanja Non Belanja Modal	-	-
• Mutasi masuk dari SKPD	-	-
• Hibah masuk dari non SKPD	-	-

• Koreksi tambah	-	-
Jumlah	-	-

Mutasi pengurangan tahun 2019 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke SKPD	-	-
• Hibah keluar ke non SKPD	-	-
• Reclass keluar	-	-
• Koreksi kurang	-	-
• Penghapusan	-	-
Jumlah	-	-

Jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2020 sebanyak 3 dengan nilai Rp 400.574.729,00 tersebut meliputi :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Jalan dan jembatan	-	-
2.	Bangunan air/irigasi	-	-
3.	Instalasi	2	176.415.479
4.	Jaringan	1	224.159.250
	Jumlah	3	400.574.729

Sedangkan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2020 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1.Nilai Perolehan Per 31 Des 2020	400.574.729
2.Penyusutan Tahun 2020	(20.028.736)
3.Akumulasi Penyusutan s/d tahun lalu	(220.704.837)
4.Akumulasi Penyusutan s/d tahun ini	(240.733.219)
5.Nilai Buku Per 31 Desember 2020	159.841.510

Aset Lainnya

2.3. Aset Lainnya sebesar

Rp 2.002.050.371,00

Rp
2.002.050.371,00

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.002.050.371,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 722.534.000,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.279.516.371,00.

Saldo aset lainnya yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.002.050.371,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2019	Mutasi Tahun 2020		Saldo 31/12/2020
		Tambah	Kurang	
Aset untuk Dihilangkan	0	0	0	0
Piutang TP/TGR	0	0	0	0
Aset Lain-Lain (Rusak)	0	1.264.556.371	0	1.264.556.371
Aset Tak Berwujud	722.534.000	14.960.000	0	737.494.000
Jumlah	722.534.000	1.279.516.371	0	2.002.050.371

Aset Lain-lain (Rusak)
Rp
1.267.556.371,00

2.3.1. Aset Lain-lain (Rusak) sebesar Rp 1.264.556.371,00

Saldo Aset Lain-lain (Rusak) per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.264.556.371,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,00, sehingga terdapat kenaikan sebanyak sebesar Rp 1.264.556.371,00.

Nilai Aset Lain-lain (Rusak) sebesar Rp 1.264.556.371,00 tersebut merupakan nilai historis/perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Saldo Aset Lain-lain (Rusak) yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020, dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2019	Mutasi Tahun 2020		Saldo 31/12/2020
		Tambah	Kurang	
Alat Kantor	0	77.426.000		77.426.000
Alat Rumah	0	43.981.000		43.981.000

Tangga				
Peralatan Komputer	0	652.031.871		652.031.871
Alat Studio	0	130.167.500		130.167.500
Alat Komunikasi	0	360.950.000		360.950.000
Alat Angkutan	0	0		0
Jumlah	0	1.264.556.371		1.264.556.371

Mutasi penambahan tahun 2020 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi masuk	-	-
• Reklas Masuk	-	1.264.556.371
Jumlah	-	-

Mutasi pengurangan tahun 2019 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke BPPKAD		
• Hibah keluar ke non SKPD	-	-
• Reclass keluar	-	-
• Koreksi kurang	-	-
• Penghapusan	-	-
Jumlah	-	-

Aset Lain-lain (Rusak) per 31 Desember 2020 sebanyak 113 dengan nilai Rp. 1.264.556.371,00 tersebut meliputi :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Alat Kantor dan Alat RT	28	121.407.000
2.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	29	491.117.500
3.	Peralatan Komputer	56	652.031.871
	Jumlah	113	1.264.556.371

Sedangkan nilai Aset Lain-lain (Rusak) Per 31 Desember 2019 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

1.Nilai Perolehan Per 31 Des 2020	1.264.556.371
2.Penyusutan Tahun 2019	(0)
3.Akumulasi Penyusutan s/d tahun lalu	(0)
4.Akumulasi Penyusutan s/d tahun ini	1.262.676.258
5.Nilai Buku Per 31 Desember 2018	1.880.000

2.3.2 Aset Tak Berwujud sebesar **Rp 737.494.000,00**

Aset Tak
Berwujud Rp
737.494.000,
00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp.737.494.000,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 722.534.000,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 14.960.000,00. Saldo Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 737.494.000,00,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2019	Mutasi Tahun 2020		Saldo 31/12/2020
		Tambah	Kurang	
Software	722.534.000	14.960.000	0	737.494.000
Jumlah	722.534.000	14.960.000	0	737.494.000

Mutasi penambahan tahun 2020 merupakan aset tak berwujud yang diperoleh di tahun 2020 sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	DED Command Center Banjarnegara	14.960.000
	Jumlah	14.960.000

Sedangkan mutasi kurang tahun 2020 merupakan aset tetap tak berwujud yang dihapuskan habis masa manfaatnya di tahun 2020 sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	-	-
2.	-	-
	Jumlah	-

Sedangkan nilai Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2020 setelah dikurangi akumulasi amortisasi sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1.Nilai Perolehan Per 31 Des 2020	737.494.000
2.Amortisasi Tahun 2020	(59.032.600)
3.Akumulasi Amortisasi s/d tahun lalu	(581.606.200)
4.Akumulasi Amortisasi s/d tahun ini	(640.638.800)
5.Nilai Buku Per 31 Desember 2020	96.855.200

2.4. KEWAJIBAN

2.4.1. Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp 66.910.167,00**

Kewajiban

Rp

66.910.167,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp 66.910.167,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.349.404,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp 61.560.763,00. Kenaikan/penurunan Kewajiban Jangka Pendek tersebut disebabkan adanya belanja telepon, listrik, Internet, dan utang beban pegawai (kekurangan Tambahan Penghasilan) yang belum dibayarkan per 31 Desember 2020.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp 66.910.167,00,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 01/01/2019	Mutasi Tahun 2019		Saldo 31/12/2020
		Tambah	Kurang	
Utang Beban	5.349.404	61.560.763	0	66.910.167
Jumlah	5.349.404	0	0	66.910.167

Utang Beban **2.4.1.1 Utang Beban sebesar Rp 66.910.167,00**

Rp Saldo utang beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp 66.910.167,00,
66.910.167,0 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.349.404,00, sehingga
0 terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp 61.560.763,00

Saldo tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Utang Beban Listrik	2.256.482
2.	Utang Beban Telepon	545.711
3.	Utang Beban Air	0
4.	Utang Beban Kawat/Faksimili/Internet	59.999.974
5.	Utang Beban Pegawai	4.108.000
6.	Utang Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0
	Jumlah	66.910.167

Ekuitas **2.5. EKUITAS**

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas SKPD Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.316.579.591,00.

Catatan **2.6. CATATAN PENTING LAINNYA**

Penting
Lainnya

Di samping informasi utama tersebut di atas, beberapa hal penting yang perlu diinformasikan dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- a. Dampak penyajian nilai aset dalam neraca akibat diberlakukannya batas minimal kapitalisasi aset.**

Nilai aset yang disajikan dalam neraca adalah aset yang mempunyai nilai yang cukup material sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, mengenai batas minimal kapitalisasi aset. Dalam kebijakan akuntansi tersebut batas minimal aset yang disajikan dalam neraca adalah:

- Untuk kelompok peralatan dan mesin minimal nilai per unitnya Rp 500.000,00
- Untuk Gedung dan Bangunan minimal nilai per unitnya Rp 10.000.000,00.

Sementara itu untuk aset yang nilainya dianggap tidak material disajikan secara terpisah (*extracomptable*) dari aset yang disajikan dalam neraca. Sampai dengan tahun pelaporan 2020 berjumlah sebesar Rp. 820.000,00

b. Kegiatan yang dibiayai dari dana bukan APBD Kabupaten Banjarnegara

Dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mendapat dukungan dana dari APBN, LOAN dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi penggunaan dana yang berasal dari APBN untuk pelaksanaan kegiatan Tugas Perbantuan (TP) dan Dekonsentrasi (Dekon) yang dikelola oleh SKPD dengan rincian berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Dana Dekonsentrasi (DK)	-	-	-
2.	Dana Tugas Pembantuan (TP)	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Realisasi penggunaan dana LOAN/*Block Grant* yang berasal dari luar negeri yang dikelola oleh SKPD dengan rincian berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Dana Dekonsentrasi (DK)	-	-	-

2.	Dana Tugas Pembantuan (TP)	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Dana yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang dikelola SKPD dengan realisasi dana sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Dana Dekonsentrasi (DK)	-	-	-
2.	Dana Tugas Pembantuan (TP)	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

c. Aset tetap pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan selain Milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Di samping mengelola aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dinas/Kantor/Badan juga mengelola aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp00 dan Pemerintah Pusat sebesar Rp00 untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan rincian:

(dalam satuan Rupiah)

No	Jenis Aset tetap	BMD Provinsi	BMN
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-
4	Jalan, Bangunan Air dan Jaringan	-	-
5	Aset tetap Lainnya	-	-
	JUMLAH	-	-